

**ELASTISITAS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SUBSEKTOR
INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN DATI II JEMBER
PERIODE 1994 - 1999**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Oleh

Indrata Oktavianto
NIM. 9308101222

Asal	: Hadiah	Klass
Terima Tgl:	10 FEB 2001	331-7
No. Induk :	102 335 166	OKT
		2

PEREKERJA - INDUSTRI

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2000

JUDUL SKRIPSI

ELASTISITAS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SUBSEKTOR INDUSTRI KECIL
DI KABUPATEN DATI II JEMBER PERIODE 1994-1999

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Indrata Oktavianto

N. I. M. : 9308101222

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

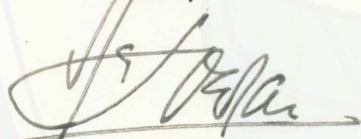
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

7 Oktober 2000

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Drs. Bambang Yudono, MM.

NIP. 130 355 409

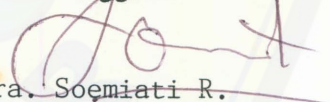
Sekretaris,



Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

NIP. 131 658 376

Anggota,



Dra. Soemiati R.

NIP. 130 325 927

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Drs. H. Liakip, SU.

NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Dati II Jember periode 1994 - 1999.
Nama Mahasiswa : Indrata Oktavianto
NIM : 9308101222
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Pertanian dan Industri

Pembimbing I



Dra. Soemiati
NIP. 130 325 927

Pembimbing II



Drs. Urip Muharso
NIP. 131 120 333

Ketua Jurusan



Dra. Aminah
NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : 25 Agustus 2000

Motto :

***"TIDAK ADA KEUNGGULAN SEJATI DI DUNIA INI YANG DAPAT
DIPISAKAN DARI KEHIDUPAN YANG BENAR"
(DAVID STARR JORDAN)***

Kupersembahkan atas perjuangan dan do'a yang tulus kepada :

- 1. Ayahanda Drs. Soetoko dan Ibunda Annie yang senantiasa sabar dan penuh kasih sayang*
- 2. Saudara-saudaraku mbak Ita, Mas Antok, dik Anna*
- 3. Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAKSI

Di negara-negara sedang berkembang pertumbuhan penduduk yang sangat besar jumlahnya menambah kerumitan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Dapatlah dikatakan bahwa masalah penduduk merupakan salah satu masalah pembangunan yang paling utama dan paling sukar diatasi.

Akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan penduduk terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktifitas sektor produksi sangat rendah dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran. Dengan berlakunya dua hal ini maka pertumbuhan penduduk tidak akan menaikkan produksi dan dapat menyebabkan penurunan dalam tingkat pendapatan per kapita.

Oleh sebab itu penciptaan lapangan kerja yang lebih luas menjadi suatu isu yang dominan dalam pembangunan di negara yang sedang berkembang. Michael Todaro menyatakan bahwa ada lima unsur kunci dalam strategi pemekeraan/penciptaan lapangan kerja di negara-negara sedang berkembang, yaitu : (1) penciptaan keseimbangan ekonomi desa dan kota, (2) ekspansi industri-industri skala kecil, (3) eliminasi distorsi harga faktor produksi, (4) pemilihan teknologi padat karya yang tepat, (5) modifikasi pertautan langsung antara pendidikan dan pemekeraan.

Disebutkan bahwa industri skala kecil merupakan salah satu unsur dari strategi pemekeraan yang komprehensif di negara-negara sedang berkembang, hal ini berkaitan dengan sifatnya yang padat karya dan tidak memerlukan pengetahuan teknis atau pun keterampilan yang tinggi bagi tenaga kerjanya.

Sehubungan dengan hal itu skripsi ini mencoba meneliti kemampuan dari subsektor industri kecil dalam menyerap tenaga kerja. Dengan menggunakan alat analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja maka dapat diketahui apakah industri kecil memiliki kemampuan yang cukup besar atau tidak dalam menyerap tenaga kerja.

Obyek penelitian ini adalah subsektor industri kecil di Kabupaten Jember dengan pertimbangan bahwa , (a) daerah ini mempunyai potensi untuk perkembangan industri kecil, (b) daerah ini memiliki sumber daya manusia melimpah yang sebagian besar pendidikannya relatif rendah sehingga memerlukan lapangan kerja yang bersifat *unskilled labour intensive*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsektor industri kecil di Kabupaten Jember selama periode tahun 1994-1999 memiliki daya serap yang cukup baik (nilai elastisitas penyerapan tenaga kerjanya sebesar 0,56). Hal ini berarti bahwa jika subsektor industri kecil Kabupaten Jember terus dikembangkan, subsektor ini menjanjikan sumbangan yang berarti bagi penyediaan lapangan kerja dan pembangunan di Kabupaten Jember:

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME. yang telah melimpahkan segala kasih dan rahmatNya, , sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul Elastisitas Penyerapan Tenaga kerja Kerja pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Dati II Jember Periode 1994 – 1999 ” dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Selama pembuatan hingga selesainya skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan baik moril maupun materiil dan bimbingan serta saran yang tidak terhingga nilainya. Karena itulah sudah selayaknya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

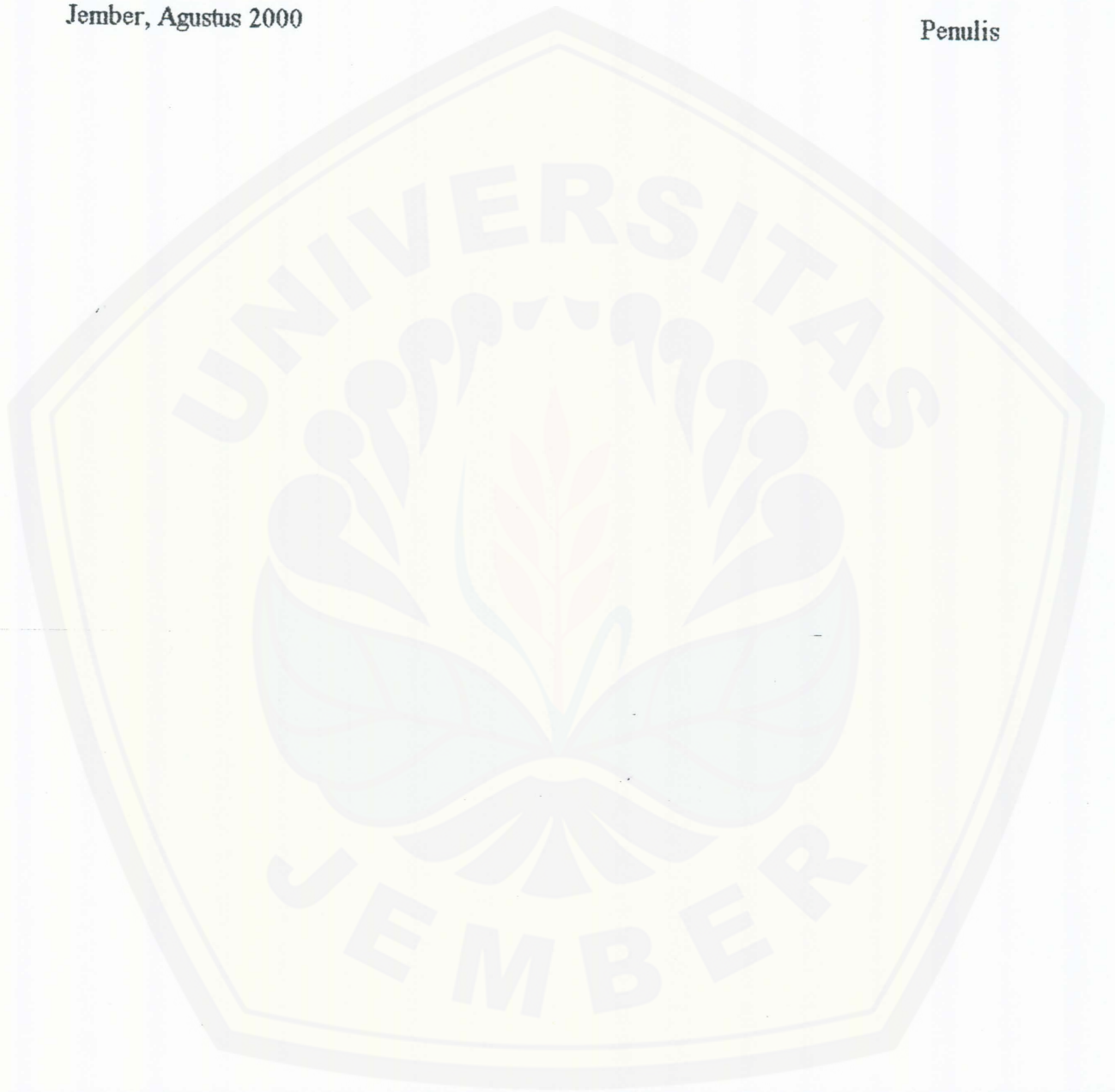
1. Ibu Dra. Sumiati dan Bapak Drs. Urip Muharso selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang dengan seksama dan kesabaran hati telah memberikan motivasi dan bimbingan serta saran-saran yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Drs. H.Liakip, S.U. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama berada di bangku kuliah, Staff pengajaran dan semua karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Teman-teman dan rekan-rekanku seperjuangan: Emanuel “Tewel”, Wawan, Agus, Binsar, dll yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
5. Dinas Perindustrian Kabupaten Jember, Kantor Statistik Kabupaten Jember yang telah banyak memberikan bantuan informasi, data serta pengetahuan yang berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan. Oleh karena itu

kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan pembaca semuanya.

Jember, Agustus 2000

Penulis



DAFTAR ISI

Isi	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya	7
2.2 Pembangunan dan Pemekerjaan di Negara-negara Sedang Berkembang.....	7
2.3 Pembangunan Industri	18
2.4 Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	21
2.4.1 Angkatan Kerja	22
2.4.2 Bukan Angkatan Kerja	23
2.4.3 Permintaan Tenaga Kerja	25
2.4.4 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja	27

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Dacrah Penelitian.....	29
3.3MetodePengambilanData	29
3.4 Metode Analisis Data	29
3.5 Definisi Variabel Operasional	30

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	31
4.1.1KeadaanGeografisKabupatenJember.....	31
4.1.2Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten Jember	32
4.1.3 Perkembangan Industri di Kabupaten Jember	35
4.2 Analisis Data	36
4.3 Pembahasan	39

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	40
5.2 Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1	43
Lampiran 2	44
Lampiran 3	45
Lampiran 4	46



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 : Klasifikasi Penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Jember sampai tahun 1998	32
2 : Jumlah Pencari Kerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Jember sampai tahun 1998	34
3 : Perkembangan Nilai Produksi dan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil di Kabupaten Jember tahun 1994 – 1999	36
4 : Laju Kenaikan Tenaga Kerja yang Terserap pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember Tahun 1994-1999.....	37
5 : Laju Kenaikan Nilai Produksi pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember Tahun 1994-1999	37
6 : Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember Tahun 1994-1999	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Kurva Peengaruh Pilihan Teknologi Terhadap Permintaan Tenaga Kerja	15
2	Kurva Permintaan Tenaga Kerja	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1 : Daftar Produk Industri di Wilayah Kabupaten Jember	43
2 : Pertumbuhan Nilai Produksi Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember periode tahun 1994 – 1999	44
3 : Pertumbuhan Tenaga Kerja Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember periode tahun 1994 – 1999	45
4 : Elastisitas Tenaga Kerja Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember periode tahun 1994 – 1999	46

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap bangsa membutuhkan pembangunan, ini merupakan suatu tujuan yang bagi kebanyakan orang merupakan hal yang wajar yang terjadi dengan sendirinya. Sementara kemajuan dibidang ekonomi merupakan unsur paling penting dari setiap pembangunan, namun unsur itu bukanlah satu-satunya. Ini disebabkan karena pembangunan tidak semata-mata suatu fenomena ekonomi. Pada akhirnya, pembangunan menuntut kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih daripada sekedar sisi material dan finansial dari kehidupan manusia. Pembangunan oleh karena itu harus dipahami sebagai suatu proses multi dimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur, sikap dan faktor kelembagaan, juga percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan absolut. Pada hakikatnya, pembangunan harus berlangsung pada suatu tingkat perubahan secara menyeluruh sehingga suatu sistem sosial, yang telah diselaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dasar masing-masing pribadi dan kelompok yang beraneka ragam dalam sistem tersebut, akan bergerak menjauhi kondisi hidup yang secara umum dianggap kurang memuaskan dan mengarah ke situasi atau kondisi hidup yang secara material dan spiritual dianggap lebih baik (Todaro, 1994:138).

Pembangunan dalam arti yang lebih sempit adalah pembangunan yang dipandang dari segi ekonomi, disebut pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat dirumuskan sebagai bentuk usaha untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan pengangguran dalam konteks luas pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. "Pendistribusian kembali tingkat pertumbuhan" menjadi slogan yang umum dipakai dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara oleh seorang pakar ekonomi (Profesor Simon Kuznets) didefinisikan sebagai 'suatu kenaikan

Digital Repository Universitas Jember

dalam jangka panjang kemampuan untuk meningkatkan sediaan berbagai macam barang kebutuhan ekonomi bagi penduduknya' (Todaro, 1994:140).

Catatan sejarah pertumbuhan negara-negara yang kini dibilang maju mengungkapkan bahwa tingkat perubahan struktural dan sektoral yang tinggi melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama dari perubahan sektoral ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang pertanian ke bidang non pertanian dan yang berlangsung akhir-akhir ini dari sektor industri ke sektor jasa. Pola pertumbuhan ekonomi secara sektoral di Indonesia sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara, dimana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian (sektor primer), sementara kontribusi sektor sekunder dan tersier cenderung meningkat. Hanya saja strategi industrialisasi (sektor sekunder) di Indonesia yang banyak mengandalkan akumulasi modal, proteksi dan teknologi tinggi telah menimbulkan polarisasi dan dualisme dalam proses pembangunan.

Berbagai macam dualisme yang terdapat di negara-negara berkembang, terutama dualisme sosial dan teknologi, menimbulkan keadaan-keadaan yang menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efisien. Penggunaan teknologi yang terlalu tinggi di sektor modern menimbulkan kesulitan bagi suatu negara untuk mempercepat perkembangan kesempatan kerja di sektor modern. Hal ini akan menambahkan kerumitan masalah pengangguran yang dihadapi dan akan memperbesar jurang diantara tingkat pendapatan di sektor-sektor ekonomi yang lebih modern dan sektor-sektor ekonomi yang tradisional.

Hampir menjadi suatu dogma dalam literatur tentang pembangunan, bahwa tujuan hendak menyerap tenaga kerja secara maksimal malahan akan memperkecil keseluruhan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Akan tetapi, sebagaimana diketahui, kebijakan konvensional yang mengandaikan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional dan distribusi pendapatan yang lebih merata akan merupakan sasaran-sasaran yang tercapai sekaligus secara timbal balik, akhir-akhir ini telah ditinjau kembali sehingga banyak ahli ekonomi sekarang yakin bahwa strategi

pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja (dan oleh karena itu juga berorientasi pada usaha mengurangi kemiskinan secara tidak langsung) tampaknya juga merupakan sesuatu yang mempercepat dan bukan menghambat kemajuan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini khususnya benar jika menyangkut pembangunan dan pertumbuhan sektor desa dan sektor kota skala kecil. Semakin banyak pekerjaan semakin bertambah pendapatan bagi si miskin, yang pada gilirannya akan menciptakan permintaan yang lebih besar untuk produk-produk konsumsi pokok yang diproduksi secara lokal. Karena produk-produk ini cenderung lebih padat karya dibandingkan kebanyakan produk yang dihasilkan oleh industri-industri berskala besar, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan mewah orang-orang kaya, akan membuat lebih banyak lapangan pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi yang dapat menjadi fenomena terjadinya dorongan dari dalam (*self-reinforcing*). Akhirnya, semuanya itu akan mendorong tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi baik dalam pekerjaan maupun dalam keluaran nasional (Todaro, 1994:319).

Menurut pandangan ekonomi Marxis dari Tyagunenko dan kawan-kawan terdapat sejumlah alasan-alasan rasional, baik sifatnya ekonomis dan sosial bagi pengembangan industri kecil yaitu:

1. Industri kecil memperkuat kedudukan pengusaha nasional yang sudah bergerak di bidang ini dan merupakan modal bagi pembangunan yang mendasarkan diri pada sumber bahan pertanian dan bahan lokal lainnya.
2. Industri kecil membutuhkan modal yang relatif kecil sehingga memudahkan pengusaha-pengusaha sederhana untuk mendirikan pabrik-pabrik secara kecil-kecilan.
3. Industri kecil umumnya mengkhususkan diri pada produksi barang-barang konsumsi dan ini dalam batas-batas tertentu melepaskan sebagian beban impor dan menghemat devisa.
4. Industri kecil merupakan sumber yang cukup penting bagi penghasilan negara.

Digital Repository Universitas Jember

Direktur Institute for Small Scale Industries dari Universitas Filipina, Leon V. Chico mengemukakan bahwa industri kecil dan kerajinan rumah tangga mempunyai beberapa keuntungan dibanding industri besar yaitu:

1. Memiliki sejumlah fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang sulit dilakukan oleh industri besar.
2. Tidak bergantung pada sumber tenaga oleh karena itu bisa menghindarkan diri dari akibat krisis energi.
3. Pemasaran barang-barang kerajinan tidak begitu terpengaruh resesi ekonomi dunia dan menurunnya intensitas perdagangan internasional.
4. Merupakan sumber penghasilan devisa negara.
5. Mengurangi tendensi monopoli.
6. Merupakan cara yang efektif untuk pembentukan kapital.
7. Bagi perencana subsektor ini sejalan dengan usaha pembangunan daerah.
8. Memberi iklim kepada kreatifitas masyarakat selain sejalan dengan usaha mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan setempat (M. Dawam Rahardjo, 1986: 96-98).

Industri skala kecil sebagai salah satu subsektor industri baru dikenal di Indonesia setelah dikeluarkan UU RI No. 5 tahun 1984, disebutkan bahwa: "Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, baik yang menggunakan proses modern dan tradisional".

Dinamika di dalam perekonomian Indonesia ditandai oleh peran industri kecil yang tidak bisa diabaikan. Dilihat dari komposisi ekspor Indonesia yakni yang menunjukkan semakin dominannya produk-produk *unskilled labour intensive*, merupakan pertanda bahwa peranan industri kecil dalam ekspor cenderung meningkat. Kinerja mengesankan dari industri kecil dan rumah tangga tersebut menunjukkan potensi dinamik mereka yang sangat besar (Faisal Basri 1995:152).

Digital Repository Universitas Jember

Perhatian untuk menumbuhkembangkan industri kecil di Indonesia setidaknya dilandasi oleh tiga alasan, yaitu : 1) industri kecil banyak menyerap tenaga kerja 2) industri kecil memainkan peranan penting dalam ekspor non migas 3) adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida pada PJPT I menjadi semacam gunung pada PJPT II. Struktur ekonomi bentuk piramida terbukti telah mencuatkan isu konsentrasi dan konglomerasi, serta banyak dituding melestarikan dualisme perekonomian nasional. Bentuk ideal yang banyak disarankan adalah gunung, dimana : pada bagian atas adalah kelompok usaha besar yang memang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional tetapi proporsinya relatif lebih kecil daripada kelompok usaha menengah. Di bagian tengah menunjukkan kelompok usaha menengah yang merupakan proporsi terbesar dari struktur ekonomi nasional, sedangkan bagian bawah hanyalah sebagian kecil saja dari keseluruhan struktur ekonomi nasional. Porsi yang menciut dari usaha kecil bukan diartikan matinya usaha kecil akibat persaingan, namun justru sebaliknya meningkatnya kelas usaha kecil menjadi usaha skala menengah.

Kabupaten Dati II Jember adalah suatu daerah yang dianggap menduduki ranking ke-3 yang termaju di Propinsi Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk kira-kira sebesar 2.156.910 jiwa (data statistik 1998) Kabupaten Jember memiliki sumber daya manusia yang melimpah, yang jika tidak dapat diberdayakan dengan baik justru akan menimbulkan masalah bagi pembangunan daerah tersebut. Data statistik 1998 menunjukkan bahwa sebagian besar pencari kerja di Kabupaten Jember berpendidikan rendah (40% adalah lulusan sekolah dasar), oleh karena itu salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh dalam perluasan kesempatan kerja yaitu dengan mengembangkan dan memajukan industri skala kecil. Kenyataan menunjukkan bahwa industri skala kecil tidak menuntut persyaratan pengetahuan teknis ataupun keterampilan yaang terlalu tinggi bagi tenaga karyawan. Hal ini disebabkan karena sektor industri tersebut masih bekerja dengan alat-alat produksi yang sederhana.

Digital Repository Universitas Jember

Di Kabupaten Jember terdapat 77 macam produk industri dihasilkan, sebagian besar diproduksi oleh industri kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki potensi bagi pengembangan industri kecil. Industri kecil diharapkan mampu menyerap sumber daya manusia yang melimpah sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang lebih merata dan pengurangan atau penghapusan kemiskinan absolut di daerah tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Subsektor industri kecil mempunyai peranan penting dalam rangka menunjang pembangunan antara lain dengan memperluas kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Permasalahan yang timbul adalah seberapa besar kemampuan subsektor industri kecil dalam menyerap tenaga kerja.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan subsektor industri kecil di Kabupaten Jember dalam menyerap tenaga kerja periode 1994-1999.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah hasil penelitian yang berupa kesimpulan dan saran dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan subsektor industri kecil di Kabupaten Jember.
2. Sebagai salah satu sumber referensi bagi penelitian yang sejenis/ terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Menurut data statistik pemerintahan, industri kecil dan rumah tangga pada tahun 1974/1975 mampu menyerap sekitar 87% tenaga kerja dari seluruh lapangan kerja yang ada dalam sektor industri (H.W Arndt, 1994:247). Pada tahun 1993 sektor industri menyerap lebih dari 8.5 juta orang tenaga kerja. Proporsi pekerja industri kecil dan kerajinan rumah tangga lebih besar daripada pekerja yang diserap oleh industri-industri berskala besar dan sedang, yaitu 58,05% berbanding 41,95% (Dumairy, 1996:240).

Penelitian mengenai penyerapan tenaga kerja pada subsektor industri kecil di Propinsi Jawa Timur periode tahun 1988-1992 oleh Frans W. Kaunang menunjukkan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja subsektor tersebut sebesar 0.91 yang berarti selama periode tersebut subsektor industri kecil bersifat inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang lainnya adalah mengenai penyerapan tenaga kerja subsektor industri kecil di Kabupaten Jember periode 1989-1992 oleh Ahmad Zuchridin. Penelitian ini menunjukkan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja subsektor industri kecil sebesar 0,87.

Dari hasil penelitian - penelitian diatas tampak bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja subsektor industri kecil tidak sama / berubah menurut ruang lingkupnya maupun periode waktunya. Karena itu perlu diadakan penelitian terbaru mengenai elastisitas penyerapan tenaga kerja subsektor industri kecil.

2.2 Pembangunan dan Pemekerjaan di Negara-negara Sedang Berkembang

Sumber daya manusia / penduduk merupakan faktor terpenting dalam pembangunan ekonomi. Dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi penduduk memegang peranan yang penting karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Sebagai

akibat dari beberapa fungsinya ini maka penduduk bukan saja merupakan salah satu faktor produksi, akan tetapi lebih penting lagi penduduk merupakan unsur (a) yang menciptakan dan mengembangkan teknologi, (b) yang mengorganisasi penggunaan berbagai faktor produksi (Sadono Sukirno 1981:174).

Pertumbuhan penduduk di negara-negara maju membantu kemajuan ekonomi negara-negara tersebut karena mereka sudah makmur, mempunyai modal yang melimpah sedangkan buruh/tenaga kerja kurang. Di negara-negara seperti itu, kurva penawaran buruh bersifat elastis sehingga tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi bagaimanapun justru akan menaikkan produktivitas. Kenyataannya, kenaikan jumlah penduduk menghasilkan GNP yang lebih tinggi ketimbang sekedar proporsional.

Akan tetapi di negara terbelakang/ berkembang, akibat pertumbuhan penduduk pada pembangunan tidaklah demikian karena kondisi yang berlaku sama sekali berbeda dengan kondisi pada negara maju. Ekonomi negara terbelakang miskin, modal kurang, buruh melimpah. Karena itu pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan dan menyebabkan pengangguran. Belum lagi masalah penyediaan pangan yang luar biasa banyaknya. Bahkan kebutuhan untuk menyediakan prasarana kepada rakyat cenderung mengalihkan pengeluaran negara dari aktiva produktif. Penyediaan fasilitas pendidikan dan sosial secara memadai makin sulit terpenuhi. Tekanan penduduk kian cenderung menimbulkan masalah neraca pembayaran. Bahan pangan, barang-barang konsumen, bahan mentah, peralatan modal dan sebagainya, perlu diimpor untuk memenuhi permintaan penduduk yang semakin membengkak. Selanjutnya, kegagalan memenuhi permintaan yang meningkat seperti itu tambah memperberat tekanan inflasioner. Tak kalah pentingnya, pertumbuhan penduduk semakin menekan pendapatan per kapita, menurunkan standar kehidupan dan menurunkan tingkat pembentukan modal (M.L Jhingan 1999: 405-406).

Kemiskinan yang luas di negara-negara sedang berkembang cenderung mendorong tingkat kelahiran yang tinggi, karena alasan bahwa keluarga-keluarga

yang tidak cukup memiliki penghasilan, pekerjaan, jaminan kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu tidak memiliki jaminan hidup di hari tua mereka nanti kalau tidak mengandalkan pada anak-anak mereka sendiri. Mereka terkungkung oleh perangkap keterbelakangan yang berkaitan secara timbal balik dengan ukuran keluarga mereka (Todaro, 1995:259).

Namun akan keliru jika beranggapan bahwa karena tingkat kelahiran yang tinggi negara akan memiliki pendapatan per kapita yang rendah, sementara angka kelahiran yang rendah umumnya terdapat di negara-negara yang pendapatan per kapitanya tinggi, sehingga dengan menaikkan tingkat pendapatan per kapita akan mendorong rendahnya angka kelahiran.

Tidak terdapat hubungan secara langsung atau timbal balik antara pendapatan per kapita dengan tingkat kelahiran. Negara-negara yang angka kelahirannya relatif tinggi seperti Columbia, Filipina, Peru dan Thailand memiliki variasi yang berbeda-beda untuk tingkat pendapatan per kapitanya. Demikian pula negara-negara yang angka kelahirannya relatif rendah seperti Srilanka, Korea Selatan, Singapura, Costa Rica mempunyai pendapatan nasional yang bervariasi berkisar antara US \$ 700 sampai dengan US \$ 7,940 per kapita.

Sedangkan jika angka kelahiran suatu negara dan tingkat penghasilan penduduknya yang tidak merata diperbandingkan, maka akan terdapat hubungan antara tingkat kelahiran yang rendah (tinggi) dengan besar (kecilnya) ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Negara-negara yang nisbah ketidakmerataannya atau ketidakadilannya relatif rendah menunjukkan bahwa tingkat kelahirannya pun rendah (Singapura, Srilanka, Korea Selatan) dan negara-negara yang nisbah ketidakadilannya sedang hingga tinggi menunjukkan angka kelahiran yang relatif tinggi (Costa Rica, Filipina, Sinegal, Mexico, Columbia, Peru, Brasil) (Todaro, 1995: 257-259).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang berusaha untuk menurunkan ketidakmerataannya pada distribusi pendapatannya atau berusaha untuk menyebarluaskan hasil-hasil pertumbuhan ekonominya di kalangan masyarakat luas,

akan lebih mampu menurunkan tingkat kelahirannya jika dibandingkan dengan negara-negara yang hasil-hasil pembangunannya tidak didistribusikan secara merata, walaupun negara-negara yang terakhir ini barang kali telah mempunyai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan lebih cepat. Namun, dengan suatu kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pola-pola distribusi pendapatan yang adil atau merata itu, tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi akan menyebabkan penurunan dalam tingkat kelahiran yang lebih besar. Usaha-usaha untuk memperluas kesempatan bekerja, pendidikan, pelayanan kesehatan bagi golongan penduduk yang kurang mampu di negara-negara sedang berkembang tidak hanya akan merupakan sumbangan penting bagi tercapainya kondisi ekonomi dan psikologis yang lebih baik (yaitu sumbangan bagi pembangunan fisik dan mental mereka), tetapi juga membantu motivasi mereka agar memilih keluarga kecil, yang sangat vital bagi setiap usaha memperlambat tingkat pertumbuhan penduduk di negara-negara miskin (Todaro, 1995: 285).

Salah satu mekanisme menurunkannya kemiskinan dan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang adalah berupa ketentuan-ketentuan mengenai pengupahan yang cukup serta pemberian kesempatan bagi si miskin untuk bisa bekerja secara produktif. Walaupun penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak tidak harus dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar untuk memecahkan masalah kemiskinan (yang paling diperlukan adalah langkah-langkah dan tindakan-tindakan kongkret di bidang sosial maupun ekonomi yang menjangkau kawasan lebih luas), namun ketentuan mengenai perlunya membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak serta kesempatan yang lebih luas untuk bekerja harus diusahakan dalam rangka memecahkan masalah itu. Oleh karena itu, pemekeraan harus merupakan unsur yang penting bagi setiap strategi pembangunan yang sasarannya adalah mengurangi kemiskinan.

Selama tahun-tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an hampir telah menjadi sebuah dogma dalam kepustakaan ilmiah tentang pembangunan bahwa pembangunan ekonomi hanya akan berhasil diwujudkan apabila dilakukan melalui kekuatan

kembar, yaitu akumulasi modal dan pengembangan industri modern. Dengan mengerahkan semua daya dan upaya untuk pembangunan di sektor industri modern guna memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri dan untuk memberi jalan bagi penyerapan kelebihan atau *surplus* tenaga kerja dari desa ke wilayah ekonomi kota, negar-negar sedang berkembang diandaikan akan dapat mencapai dengan cepat sasaran swasembada ekonomi mereka. Sayang sekali, perkiraan yang demikian optimisnya mengenai kemampuan di sektor industri untuk menyerap pendatang-pendatang baru tersebut, ternyata tidak bisa terpenuhi. Kenyataannya, tidak berhasilnya industri kota modern mengembangkan diri sebagai penampung tenaga kerja, merupakan salah satu kegagalan yang paling nyata dari upaya pembangunan lebih dari tiga dasa warsa yang lalu.

Satu hal yang perlu ditekankan bahwa sekarang ini tampaknya terdapat ketidakseimbangan struktural antar permintaan sumber daya manusia dari teknologi industri yang padat modal dengan ketersediaan tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang. Alasan lain yang penting untuk dicatat adalah sektor industri modern di negara-negara sedang berkembang tidak mampu mencapai tingkat pertumbuhan pemekerjaan/ penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi untuk mampu menyerap kenaikan angkatan kerja yang tinggi di negara-negara tersebut (rata-rata kenaikan angkatan kerja di negara-negara maju tidak lebih dari 1 % per tahunnya sedangkan di negara-negara sedang berkembang rata-rata naik sebesar 3% per tahunnya).

Ada lima unsur kunci dalam strategi pemekerjaan yang komprehensif yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan pemekerjaan yang amat serius di banyak negara sedang berkembang, yaitu :

1. Penciptaan keseimbangan ekonomi desa dan kota.
2. Ekspansi industri-industri skala kecil.
3. Eliminasi distorsi harga faktor.
4. Pemilihan teknologi produksi padat karya yang tepat.
5. Modifikasi pertautan langsung antara pendidikan dan pemekerjaan (Todaro, 1995:338-339).

Perlu diingat bahwa penduduk yang jumlahnya melimpah di satu sisi merupakan kendala bagi pembangunan di negara-negara sedang berkembang, namun sekaligus juga merupakan *endowment factor* negara-negara tersebut karena penduduk yang melimpah menyediakan faktor produksi tenaga kerja yang melimpah pula. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menitikberatkan pada *endowment factor* akan membuat suatu negara lebih mudah atau cepat mencapai tujuan-tujuan pembangunannya. Dengan memperbaiki pemekerjaan/ menciptakan lapangan kerja yang lebih luas maka *endowment factor* negara-negara sedang berkembang (tenaga kerja) dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga tujuan-tujuan pembangunan negara-negara tersebut akan lebih mudah/ cepat dicapai.

Seperti yang telah disebutkan, industri kecil merupakan salah satu dari lima unsur strategi pemekerjaan yang komprehensif di negara-negara sedang berkembang karena sifatnya yang padat karya. Pengembangan industri kecil akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat menengah kebawah, selanjutnya hal ini akan meningkatkan permintaan yang lebih besar untuk produk-produk konsumsi pokok yang kebanyakan diproduksi oleh industri kecil. Proses ini akan berkelanjutan sehingga menjadi fenomena terjadinya dorongan dari dalam (*self-reinforcing*) yang akan mendorong tingkat pertumbuhan menjadi lebih tinggi baik dalam keluaran nasional maupun dalam pemekerjaan agregat.

Profesor Mahalanobis secara lebih luas menjelaskan pentingnya pengembangan subsektor industri kecil di negara-negara sedang berkembang sebagai berikut: " tujuan jangka panjangnya adalah untuk memakai secepat mungkin mesin teknologi yang paling maju untuk memproduksi barang investasi dan barang konsumen. Hal ini tidak akan segera terjadi karena kurangnya dasar industri berat yang memadai. Karenanya, perlu dirancang lebih dulu suatu masa peralihan yang lebih menekankan pada industri kecil dan industri rumah tangga yang padat karya agar tercipta sebanyak mungkin lapangan kerja dalam waktu singkat dan sekaligus melepaskan sumber-sumber modal untuk industri berat. Namun, begitu

perekonomian berkembang dan pekerjaan meningkat maka kebutuhan untuk memberikan preferensi pada produksi yang padat karya tetapi tidak efisien akan semakin menurun. Apabila persediaan tenaga listrik, mesin, dan barang modal lainnya naik, akan dilakukan perubahan secara berangsur-angsur dan mantap ke arah bentuk-bentuk produksi yang lebih efisien dengan meningkatkan pemakaian mesin yang digerakkan oleh tenaga listrik. Strategi perubahan berangsur-angsur dari metode produksi padat karya dan rendah modal sampai pada metode padat-modal yang mutakhir sangat sesuai bagi negara terbelakang pada tahap-tahap awal industrialisasi. Kebijakan seperti itu tidak hanya mengekonomiskan penggunaan sumber modal yang tersedia tetapi juga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Dengan meningkatkan persediaan barang pertanian dan barang konsumen manufaktur, berarti akan meniadakan keperluan bahan makanan impor dan bahan mentah. Berarti tidak perlu lagi banyak barang modal. Karena itu strategi pemilihan teknik ini akan cenderung menekan kecenderungan inflasioner dan kesulitan neraca pembayaran yang melekat dalam setiap proses pembangunan.

2.3. Pembangunan Industri

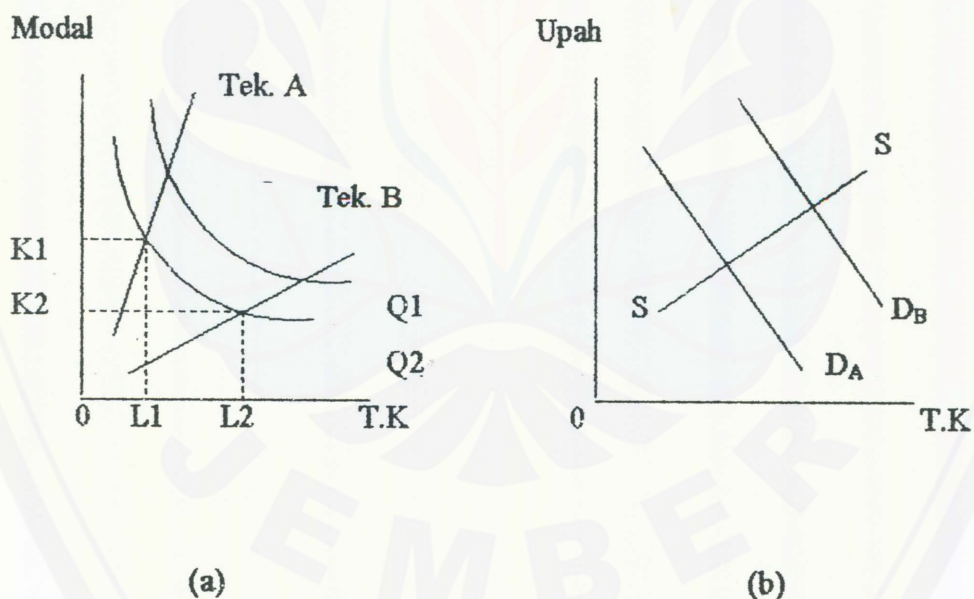
Pembangunan industri merupakan suatu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengertian ini meliputi tingkat hidup yang lebih maju dan taraf hidup yang lebih bermutudangan kenaikan pendapatan per kapita. Proses industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber alam dan sumber daya yang lainnya. Hal ini pula berarti sebagai usaha untuk meningkatkan produktifitas tenaga manusia disertai usaha memperluas ruang lingkup kegiatan manusia sehingga dapat memperbesar nilai tambah kegiatan ekonomi serta memperluas lapangan kerja produktif bagi penduduk yang semakin bertambah (Lincoln Arsyad, 1988;168).

Pembangunan industri dalam jangka panjang ditujukan untuk merombak struktur ekonomi dengan terciptanya sektor industri yang kuat denga didukung oleh

jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, baik yang menggunakan proses modern dan tradisional. “

Subsektor industri kecil di Indonesia dinilai sebagai sektor terpenting untuk mengikis masalah gawat yang dihadapi Indonesia, yakni pengangguran dan setengah pengangguran, mengingat teknologi yang lazim digunakan dalam proses produksinya adalah teknologi padat karya. Karena industri kecil tersebar di seluruh negeri, khususnya di daerah pedesaan, pengembangan industri kecil adalah cara yang dinilai paling besar perannya tidak hanya untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, tetapi juga untuk mendorong pembangunan daerah dan pedesaan di Indonesia.

Gambar (1) menjelaskan pengaruh pilihan teknologi terhadap permintaan tenaga kerja :



Gambar (1) memperlihatkan dua grafik. Dalam grafik (a), ditampilkan modal dan tenaga kerja, memperlihatkan kurva yang berlainan untuk produk yang sama (misalnya q_1 dan q_2 dan seterusnya). Terdapat teknologi yang bersaing – teknologi A padat modal dengan teknologi B padat karya.

Jika kebanyakan industri di negara bersangkutan berpolakan teknologi A, maka permintaan akan tenaga kerja yang timbul dari pola produksi yang menggunakan teknologi itu yakni $D_A D_A$ dalam grafik (b). Dengan cara yang sama, permintaan akan tenaga kerja yang timbul dari penerapan teknologi B adalah $D_B D_B$. Kurva $D_B D_B$ ini harus terletak di sebelah kanan $D_A D_A$ karena $D_B D_B$ menunjukkan permintaan yang lebih tinggi.

Dalam grafik (b), penawaran tenaga kerja diperkirakan merupakan garis yang melandai ke atas. Grafik (b) dengan jelas menunjukkan bahwa permintaan akan tenaga kerja dalam industri teknologi B menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah yang lebih tinggi daripada industri teknologi A. Sebuah negara yang mempunyai angkatan kerja yang berjumlah besar, pada umumnya lebih baik jika mendorong didirikannya industri yang lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja per satuan pengeluaran penanaman modal.

Jika semua hal yang lain sama, program industrialisasi yang berdasarkan pada pilihan industri yang padat karya membuka kesempatan kerja lebih banyak daripada program yang bertumpu pada industri yang padat modal. Permintaan akan tenaga kerja naik lebih cepat dengan cara ini dan dalam kenyataan memang menciptakan kondisi bagi meningkatnya upah rata-rata pekerja lebih cepat.

Pengelompokkan industri kecil berdasarkan legalitasnya terdiri atas :

1. Industri kecil yang mempunyai ijin atau daftar usaha yakni industri kecil yang mempunyai modal investasi untuk mesin dan peralatan dari Rp. 500.000,00 sampai Rp. 70.000.000,00.
2. Industri kecil tanpa diwajibkan mempunyai ijin yakni industri kecil yang mempunyai modal investasi untuk mesin dan peralatan di bawah Rp. 500.000,00.

Industri jenis pertama disebut sebagai industri formal dan yang kedua disebut industri non formal yang biasa disebut industri kerajinan rakyat.

Didasarkan pada banyaknya pekerja yang digunakan dalam suatu industri maka industri dapat dibagi sebagai berikut :

1. Industri besar, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 100 orang atau lebih.
2. Industri sedang, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 20 – 99 orang.
3. Industri kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 5 – 19 orang.
4. Industri kerajinan rumah tangga, dengan tenaga kerja sebesar 1 – 4 orang.

Adapun ciri-ciri industri kecil adalah sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga kerja umumnya sampai dengan 19 orang.
2. Investasi produksi umumnya sampai dengan Rp. 70.000.000,00.
3. Peralatan produksi umumnya sederhana.
4. Pola usaha umumnya tradisional.
5. Perusahaan terorganisir menurut struktur usaha tradisional.
6. Umumnya melayani pasaran lokal.
7. Memerlukan bimbingan kewiraswastaan.
8. Memerlukan bantuan penyediaan sarana dan prasarana serta bermodal kecil.

Beberapa alasan yang mendukung dilakukannya bantuan, pembinaan, perlindungan serta usaha untuk mempertahankan eksistensi dan peranan industri kecil, antara lain karena industri kecil :

1. Memiliki sejumlah fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang sulit dilakukan oleh industri sedang maupun besar.
2. Tidak tergantung pada sumber tenaga sehingga bisa menghindarkan diri dari krisis energi.
3. Berpotensi terhadap perluasan kesempatan kerja.
4. Mempertahankan dan mengembangkan unsur tradisi setempat.
5. Proses produksi berkadar impor rendah sehingga dapat menghemat devisa.
6. Umumnya terletak di pedesaan sehingga dapat membantu kehidupan petani.
7. Merupakan sumber penghasil devisa. (M. Dawam Rahardjo, 1986:98)

Disisi lain subsektor industri kecil memiliki beberapa kelemahan yaitu ; kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang di miliki para pengusahanya baik di bidang manajemen, desain, teknologi yang digunakan maupun pemasaran hasil produksinya serta kurangnya modal yang dimiliki para pengusaha. Pembangunan industri kecil secara kuantitatif dapat memberikan sumbangan terhadap produksi nasional yang sangat besar, jika melakukan efisiensi dalam produksi dan mengadakan diversifikasi produknya. Selain itu keberadaan industri kecil yang bersifat padat karya dan sangat mudah dalam pendiriannya akan banyak bermunculan serta akan memberikan lapangan kerja baru bagi penduduk khususnya di daerah pedesaan.

Kebijaksanaan pembangunan industri kecil di daerah-daerah adalah untuk mengupayakan masyarakat terlepas dari tingkat pendapatan yang rendah. Dengan usaha ini, kesempatan kerja dan pendapatan yang diperoleh akan menciptakan permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh industri yang dibangun. Pembangunan industri kecil akan menjadi perangsang untuk memperluas permintaan terhadap modal dan menciptakan perangsang untuk mengadakan lebih banyak penanaman modal sehingga dapat memperlancar program pembangunan (Sadono Sukirno, 1985;304).

2.4 Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi merupakan faktor yang potensial bagi pembangunan secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang cukup besar mencerminkan dua hal; pertama, jumlah penduduk yang besar menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat yang besar, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kesempatan kerja. Kedua, jumlah penduduk yang besar mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber alam yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu kesempatan kerja yang tersedia untuk kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian tenaga kerja merupakan sumber daya

untuk menjalankan proses produksi juga distribusi barang dan jasa (Yudo Swasono dan Endang Sulistyaningsih, 1987:18).

Tenaga kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pengertian umum tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam UU Pokok Ketenaga Kerjaan No. 14 tahun 1969, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Yudo Swasono dan Endang Sulistyaningsih, 1987:20). Untuk pembahasan ini yang dimaksud tenaga kerja adalah angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja (*Non Labor Force*) (Payaman J. Simanjuntak, 1985:3)

2.4.1 Angkatan Kerja (*Labour Force*)

Angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan adalah termasuk dalam sebutan angkatan kerja.

Penduduk yang digolongkan mencari pekerjaan adalah (Payaman J. Simanjuntak, 1985:3):

1. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan.
2. Mereka yang pernah bekerja tetapi menganggur dan sedang mencari pekerjaan
3. Mereka yang sedang bebas tugasnya dan sedang mencari pekerjaan.

Angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah :

1. Mereka yang selama seminggu melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atas keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua hari.
2. Mereka yang selama seminggu tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari, tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja di bidang keahliannya seperti dokter, tukang cukur dan lain-lainnya serta pekerjaan tetap,

pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena sakit, cuti, mogok, dan sebagainya.

2.4.2. Bukan Angkatan Kerja (Non Labour Force)

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat di dalam kegiatan produktif yaitu yang memproduksi barang dan jasa. Jadi yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang tidak mampu mencari pekerjaan, termasuk dalam golongan ini adalah (Payaman J. Simanjuntak, 1985:6):

1. Golongan yang masih bersaekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah atau menuntut ilmu di sekolah.
2. Golongan yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
3. Golongan lain-lain, yang digolongkan di sini adalah, (a) penerima pendapatan yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh pendapatan, seperti dari bunga simpanan, hasil sewaatas milik dan (b) mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis.

Pembangunan ketenaga kerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan sumber daya manusia di arahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggi dan produktif. Pembangunan ketenaga kerjaan merupakan upaya yang menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan, dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga mampu menciptakan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha (GBHN : TAP MPR RI No. II/MPR/1993).

Dalam pembangunan ekonomi kesempatan kerja merupakan sasaran yang penting. Kesempatan kerja di pengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah yang

tergolong tenaga kerja. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian dari mereka masih sekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain sebagai penerima pendapatan.

Di Indonesia pemilihan batas umur minimal 10 tahun tanpa batas umur maksimal. Penduduk yang berumur kurang dari 10 tahun di golongkan sebagai bukan angkatan kerja. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur minimal berdasarkan kenyataan bahwa penduduk umur 10 tahun di Indonesia sudah bekerja atau mencari kerja terutama di desa-desa. Demikian juga tidak menganut batas umur maksimal karena di Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional, hanya sebagian kecil penduduknya yang menerima tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil perusahaan swasta. Bagi golongan inipun pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka yang telah mencapai umur pensiun masih tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka tetap di golongkan sebagai tenaga kerja (Payaman J. Simanjuntak, 1985:3).

Pengalaman empiris sejak Perang Dunia II menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang secara menyeluruh jumlah penduduk dan angkatan kerja bertambah dengan laju yang lebih pesat dibandingkan dengan peluasan lapangan kerja yang bersifat produktif penuh. Dengan kata lain, pengangguran (secara terbuka maupun terselubung) lebih meluas, dibandingkan dengan kesempatan bagi angkatan kerja untuk mendapat pekerjaan yang bersifat produktif penuh (*productive employment*). Tolok ukur yang lazim digunakan untuk pekerjaan yang dianggap produktif penuh ialah : bekerja 35 jam sepenuhnya dalam satu minggu. Berdasarkan tolok ukur tersebut, masalah kesempatan kerja dan pengangguran di negara-negara berkembang ditandai oleh masih luasnya pengangguran secara terselubung. Fenomena ini berkenaan dengan pendayagunaan angkatan kerja yang tidak sepenuhnya efektif-produktif (*underemployment*). Hal itu menyangkut pengangguran yang tidak kentara di masyarakat pedesaan (*rural disguised unemployment*) yang sebagian besar terlibat di sektor pertanian maupun pengangguran terselubung dalam lingkungan kota (*urban underemployment*).

harus disertai dengan usaha meningkatkan produktivitas, baik di bidang kegiatan modern maupun di bidang tradisional. Salah satu faktor yang menghambat produksi di negara-negara berkembang dan menekan tingkat hidup golongan berpendapatan rendah ialah produktivitas yang rendah. Kenyataan ini mencerminkan kurangnya pendidikan dan latihan bagi golongan yang bersangkutan dan atau kurang adanya akses terhadap berbagai rupa sarana produksi.

Peningkatan produktivitas harus diartikan sebagai kenaikan hasil produksi per unit yang diperoleh dari kombinasi semua sarana produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain, peningkatan produktivitas yang dimaksud bersumber pada kombinasi optimal dalam penggunaan sarana-sarana produksi secara kuantitatif maupun mengenai kualitasnya. Misalnya, produktivitas tenaga kerja yang meningkat dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang membawa keterampilan yang lebih bermutu dan disertai oleh pengelolaan sumber-sumber daya produksi yang secara bersamaan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau peningkatan produktivitas semata-mata dicapai melalui substitusi modal terhadap tenaga kerja, yaitu dengan menambah atau menerapkan peralatan modal yang lebih modern sambil mengurangi jumlah tenaga kerja, maka itu berarti mengurangi pendayagunaan tenaga kerja yang tidak membawa perluasan lapangan kerja produktif dan hanya mempertajam masalah pengangguran. Penggunaan peralatan modal secara pukul rata dan menghemat pemanfaatan tenaga kerja dapat membawa hasil produksi yang lebih besar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Namun, konsekuensinya ialah pertumbuhan ekonomi melampaui perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, akan terjadi kesenjangan yang semakin besar antara pertumbuhan produksi dan pertumbuhan lapangan kerja produktif.

Kini timbul permasalahan yang menyangkut penerapan teknologi yang lebih adaptif dengan perimbangan – perimbangan keadaan yang berkisar pada tenaga kerja yang tersedia. Hal itu berkaitan dengan produksi berdasarkan teknologi padat karya tanpa mengurangi hasil produksi secara menyeluruh, dibandingkan dengan hasil produksi yang diperoleh dengan penerapan teknologi padat modal.

Digital Repository Universitas Jember

Suatu strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja produktif (*employment oriented strategy*) pada dasarnya tidak bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dalam hubungan ini pengembangan modernisasi perekonomian daerah pedesaan mengandung arti yang besar. Begitu pula pembinaan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di sektor modern dalam lingkungan kota dan di sekitarnya. Banyak jenis barang konsumsi dan setengah jadi dapat dibuat dengan penerapan teknik padat karya yang membawa hasil yang sama seperti yang diperoleh produksi yang bersifat padat modal. Lagi pula hal itu meluaskan lapangan kerja produktif dan meningkatkan pendapatan nyata bagi golongan yang bersangkutan. Pola pendekatan yang dimaksud itu mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan sekaligus menguntungkan pembagian pendapatan yang lebih merata di antara golongan-golongan pelaku ekonomi.

Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh negara-negara berkembang ialah ketimpangan antara pertumbuhan sektor industri di satu pihak dan di pihak lain perluasan kesempatan kerja produktif. Sektor industri dan pada umumnya sektor modern sangat meningkat dalam kemampuannya di bidang produksi barang dan jasa. Begitu pula proporsi sektor industri sebagai komponen produksi nasional (sumbangan industri dalam pembentukan produk nasional) sudah bertambah dengan cukup berarti. Namun hal itu satu sama lain tidak disertai oleh perluasan lapangan kerja produktif secaramemadai bagi jumlah angkatan kerja yang tersedia. Secara umum dapat dikatakan bahwa di negara-negara berkembang pertumbuhan sektor industri berlangsung lebih pesat dengan 3-4 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Di negara – negara berkembang, sektor industri manufaktur dan sektor produksi sekunder pada umumnya hanya menyerap antara 10-15 persen dari seluruh angkatan kerja. Sebaliknya di negara-negara industri jumlah tenaga kerja yang berkecimpung di sektor industri manufaktur berkisar pada 30-35 persen dari angkatan kerja.

Dari pengungkapan di atas menjadi jelas bahwa usaha penanggulangan pengangguran di negara-negara berkembang akan kurang berhasil, jika hanya dengan

mengandalkan pertumbuhan industri modern . Hal itu satu sama lain harus dilihat dalam rangka umum proses modernisasi yang meliputi pula pengembangan perekonomian daerah pedesaan maupun pembinaan lapisan industri kecil dan menengah di kota dan sekitarnya.

2.4.3 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan pengusaha akan tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang atau jasa. Orang membeli barang karena barang tersebut mampu memberikan kepuasan pada si pembeli. Pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, tergantung pada pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja disebut *derived demand*, yaitu meningkatnya permintaan barang atau jasa akan menimbulkan tambahan permintaan tenaga kerja. Variabel yang menentukan jumlah pekerja yang diminta suatu perusahaan dianalisa dalam dua tingkat, yaitu :

1. Difokuskan pada hubungan tingkat upah dan jumlah pekerja yang diminta dengan variabel lainnya khususnya permintaan atas barang atau jasa. Hubungan antara upah dan kuantitas barang yang diminta dinamakan kurva permintaan tenaga kerja yang mempunyai slope negatif yaitu apabila tingkat upah naik maka kesempatan kerja akan turun. Besarnya kesempatan kerja diukur melalui elastisitas dari kurva permintaan.
2. Difokuskan pada faktor yang dapat menyebabkan perubahan kurva permintaan tenaga kerja, khususnya kurva dalam metode produksi.

Pedoman seorang pengusaha untuk menambah atau mengurangi tenaga kerja adalah :

1. Pengusaha perlu memikirkan tambahan hasil (*output*) yang diperoleh pengusaha sehubungan dengan penambahan seorang karyawan yang disebut tambahan hasil marjinal atau *marginal physical product* dari karyawan (MPP_L).

Digital Repository Universitas Jember

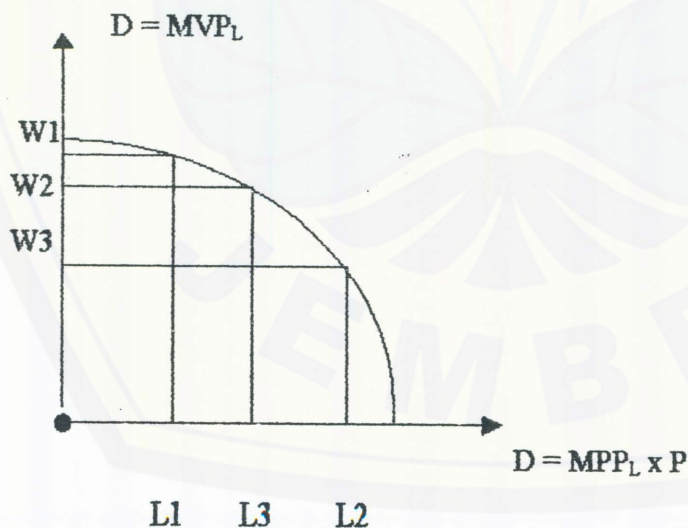
2. Pengusaha menghitung jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marjinal atau *marginal revenue*, yaitu MPP_L , jadi dapat disimpulkan :

$MR = \text{nilai dari } MPP_L, \text{ yaitu } \dots$

$$MR = MVP_L = MPP_L \times P$$

Selanjutnya MR dibandingkan dengan biaya mempekerjakan seorang tenaga kerja (MC). Apabila $MR > MC$ maka pengusaha akan memperoleh keuntungan dengan mempekerjakan tambahan tenaga kerja. Hal ini berlangsung terus menerus selama $MR > \text{Upah (W)} > MC$. Apabila tenaga kerja terus di tambah sedangkan alat-alat dan faktor - faktor produksi lainnya tetap maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marjinal menjadi lebih kecil lagi. Dengan kata lain semakin bertambah tenaga kerja yang dipekerjakan, maka semakin kecil MPP_L , yang disebut dengan hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (*The Law of Deminishing Return*).

Dengan asumsi berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang dan harga produk ditentukan oleh pasar, maka nilai produksi tambahan tenaga kerja (MVP_L) yang identik dengan kurva permintaan tenaga kerja berbentuk miring ke bawah seperti pada gambar berikut :



Gambar 1. Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Gambar 1. mengetengahkan bahwa garis DD melukiskan besarnya nilai hasil pekerja untuk tiap penggunaan tenaga kerja misalnya jumlah pekerja yang dipekerjakan sebesar $OL_1 = 100$ orang, maka nilai hasil kerja orang yang keseratus dinamakan MVP_L -nya dan besarnya sama dengan $MPP_L \times P = W_1$, nilai ini lebih besar dari tingkat upah yang berlaku (W_3). Oleh karena itu, laba pengusaha akan bertambah dengan bertambahnya tenaga kerja baru. Pengusaha akan tetap mempertahankan penggunaan tenaga kerja pada posisi OL_3 dengan tingkat upah sebesar OW_3 karena pada saat ini, pengusaha akan memperoleh keuntungan maksimum dimana $MVP_L = \text{Upah}$ (yang di bayarkan kepada karyawan). Apabila penambahan tenaga kerja lebih besar dari OL_3 , misalnya pada posisi OL_2 , maka keuntungan yang diperoleh pengusaha akan berkurang. Disini pengusaha membayar upah dalam tingkat berlaku, yakni W_3 padahal nilai hasil marjinal yang diperoleh pengusaha sebesar W_2 . Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pengusaha cenderung menghindari penggunaan tenaga kerja lebih besar dari OL_3 .

2.4.4 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Elastisitas merupakan ukuran derajat kepekaan jumlah permintaan akan sesuatu terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Koefisien elastisitas dapat didefinisikan sebagai prosentase perubahan dari sesuatu yang disebabkan oleh perubahan 1% dari faktor penentu. Angka koefisien elastisitas didapat dari pembagian antara suatu prosentase dengan suatu prosentase, maka koefisien ini adalah suatu angka yang tidak mempunyai unit atau angka murni (Boediono, 1991:205).

Elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah seberapa banyak bagian dari tenaga kerja yang ada dapat terserap dengan adanya kenaikan atau pertumbuhan produksi berarti untuk mencari elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah dengan membagi laju kenaikan penyerapan tenaga kerja dengan laju kenaikan produksi (Bruce Glassburner

dan Aditiawan Chandra, 1985:164). Dengan demikian semakin besar laju kenaikan produksi dan semakin besar laju elastisitas penyerapan tenaga kerja, maka laju penyerapan tenaga kerja akan semakin besar pula. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil elastisitas penyerapan tenaga kerja maka penyerapan tenaga kerjapun akan semakin kecil.

Elastisitas penyerapan tenaga kerja ditentukan oleh :

1. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain.
2. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan
3. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi
4. Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya (Payaman J. Simanjuntak, 1985:84)

Secara makro elastisitas penyerapan tenaga kerja digunakan untuk memperkirakan atau memproyeksikan sampai seberapa besar laju pertumbuhan produksi yang diperlukan untuk mengimbangi laju kenaikan angkatan kerja yang ada. Begitu pula sebaliknya juga digunakan untuk memproyeksikan seberapa besar angkatan kerja yang diperlukan untuk mengimbangi laju kenaikan produksi yang ada.

Secara mikro elastisitas penyerapan tenaga kerja dapat menunjukkan pola penyerapan tenaga kerja dalam suatu industri atau sektor tertentu. Jika elastisitas penyerapan tenaga kerja dalam industri besar maka industri *labour intensive* sebaliknya apabila elastisitas penyerapan tenaga kerja kecil maka dapat dikatakan industri tersebut kurang *labour intensive*.

III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang mengolah data-data sekunder dari obyek penelitian dengan menggunakan alat analisis yang bersifat deskriptif.

3.2. Daerah Penelitian

Daerah yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Dati II Jember dengan pertimbangan industri di wilayah tersebut masih didominasi oleh industri kecil dan sebagian besar tenaga kerja di daerah ini berpendidikan rendah yang memerlukan lapangan kerja bersifat *unskilled labour intensive* yang biasanya tersedia di sub sektor industri kecil.

3.3. Metode Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data runtut waktu (time series). Data diperoleh dari Departemen Perindustrian Perdagangan dan BPS Kabupaten Jember.

3.4. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui seberapa besar penyerapan tenaga kerja pada industri kecil, dengan adanya kenaikan nilai output digunakan rumus elastisitas penyerapan tenaga kerja (Bruce Glassburner dan Aditiawan Chandra, 85:164)

$$E = \frac{\Delta L(\%)}{\Delta Q(\%)}$$



Keterangan :

E = Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

$\Delta L(\%)$ = Persentase pertambahan Tenaga Kerja

$\Delta Q(\%)$ = Persentase pertambahan nilai output

Kepekaan dari penyerapan tenaga kerja dalam kaitannya dengan output dapat dijelaskan dengan kriteria elastisitas sebagai berikut (Boediono,1991:30) :

1. $E > 1$ (Elastis), artinya apabila output naik 1 persen maka jumlah tenaga kerja yang diserap akan meningkat lebih dari 1%, apabila output turun 1% maka jumlah tenaga kerja yang diserap akan turun lebih dari 1%.
2. $E = 1$ (Kesatuan Elastisitas), artinya apabila output naik 1 persen maka jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan meningkat 1%, apabila output turun 1% maka jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan turun 1%.
3. $E < 1$ (Inelastis), artinya apabila output naik 1 persen maka jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan naik kurang dari 1%, apabila output turun 1% maka jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan turun kurang dari 1%.

3.5. Definisi Variabel Operasional

Agar diperoleh suatu pengertian dan persepsi yang sama mengenai variabel-variabel yang diteliti dan cara pengukurannya maka digunakan rumusan definisi operasional sebagai berikut :

1. Subsektor industri kecil adalah sub sektor dari sektor industri pengolahan yang memiliki aset tidak lebih dari Rp. 70.000.000,- dan mempunyai tenaga kerja sampai dengan 19 orang.
2. Tenaga kerja di sini merupakan faktor produksi manusia yang terlibat di dalam proses produksi di sub sektor industri kecil.
3. Nilai output adalah kuantitas produk dikalikan dengan harga produk.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Keadaan Geografis Kabupaten Jember

Suatu daerah selalu mengalami perkembangan baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi tergantung pada potensi masing-masing daerah, maka perlu di uraikan beberapa potensi yang ada di kabupaten Jember sebagai daerah penelitian. Kabupaten Jember terletak di antara posisi $113^{\circ} 16' 28''$ sampai dengan $114^{\circ} 03' 42''$ bujur timur dan $7^{\circ} 59' 6''$ sampai dengan $8^{\circ} 33' 56''$ lintang selatan dengan luas wilayah seluruhnya $3294,34 \text{ km}^2$ Sarana jalan terbagi menjadi 2 bagian meliputi jalan nasional sepanjang $80,15 \text{ km}^2$ dan $180,78 \text{ km}^2$ jalan propinsi yang tersebar di 31 kecamatan.

Batas administrasi Kabupaten Jember, meliputi sebelah utara Kabupaten Probolinggo dan Kabupaaten Bondowoso, Samudra Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur dan di sebelah barat Kabupaten Lumajang. Kecamatan Tempurejo merupakan kecamatan terluas yaitu $793,51 \text{ km}^2$ atau $26,53\%$ dari luas Kabupaten Jember dan kecamatan Kaliwates dengan luas wilayah $24,936 \text{ km}^2$ atau $0,83\%$ dari luas Kabupaten Jember merupakan kecamatan terkecil.

Kabupaten Jember termasuk dalam zona C yang dikategorikan beriklim sedang dengan bulan basah rata-rata lima bulan, terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei serta bulan kering rata-rata empat bulan, terjadi pada bulan Agustus, September, Oktober, Nopember. Rata-rata curah hujan 1489 mm/tahun . Kecamatan Silo memiliki rata-rata curah hujan 1489 mm/tahun , meruakan kecamatan terendah curah hujannya, sedangkan kecamatan Sumber Jambe memiliki rata-rata curah hujan tertinggi , yaitu 2682 mm/tahun . Secara topografi wilayah Kabupaten Jember seluas $120.540,80$ hektar merupakan areal dengan kemiringan $0-2\%$ dengan tingkat keasaman netral yakni antara $6,0- 7.5$

4.1.2 Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten Jember

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya bila keberadaannya dikelola dengan sebaik-baiknya dan merupakan faktor-penentu keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Jember sampai tahun 1998 apabila diklasifikasikan menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel .1 : Klasifikasi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jember sampai Tahun 1998

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	88.794	94.038	182.832
5 – 9	98.510	96.072	194.582
10 – 14	107.606	103.069	210.675
15 – 19	83.638	88.823	171.801
20 – 24	67.133	90.857	157.990
25 – 29	81.559	106.654	188.206
30 – 34	86.356	100.602	186.958
35 – 39	82.295	90.042	172.337
40 – 44	83.110	77.318	160.428
45 – 49	58.131	59.790	117.921
50 – 54	62.870	52.786	115.656
55 – 59	38.879	52.447	91.326
60 +	95.524	110.614	206.138
Total	1.033.798	1.123.112	2.156.910

Sumber : BPS Kabupaten Jember tahun 1999.

$$\begin{aligned}
 \text{Ratio Beban Ketergantungan} &= \frac{P(0-10)}{P(10+)} \times 100\% \\
 &= \frac{377414}{1.779.496} \times 100\% \\
 &= 21\%
 \end{aligned}$$

Angka ketergantungan sebesar 21 berarti bahwa setiap 100 orang dalam usia produktif harus menanggung beban 21 penduduk yang tidak produktif. Jadi beban yang ditanggung relatif kecil.

Tabel 2 : Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jember sampai Tahun 1998 (dalam jiwa).

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Belum tamat SD	-	123	123
2. Tamat SD	1146	3480	4626
3. Tamat SMP			
a. Umum	91	31	122
b. Kejuruan	-	-	-
4. Tamat SMA			
a. Umum	1038	1210	2248
b. Kejuruan	793	779	1572
5. Tamat Akademi			
a. D1, D2	34	70	104
b. D3	36	125	161
6. Sarjana	1123	1290	2413

Sumber : BPS Kabupaten Jember tahun 1999

Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan data pada tabel tersebut tampak bahwa pencari kerja terbesar adalah mereka tamatan dari sekolah dasar yaitu sebesar 40%, diikuti oleh tamatan SMU (33%), kemudian sarjana (21%). Besarnya jumlah pencari kerja dengan tingkat

pendidikan rendah berarti pula harus banyak tersedia lapangan pekerjaan yang bersifat *unskilled labour intensive*, yang biasanya terdapat pada sektor-sektor informal dan industri-industri skala kecil. Dengan demikian pengembangan sektor-sektor informal dan industri-industri skala kecil haruslah menjadi suatu strategi bagi penyediaan lapangan kerja di kabupaten Jember.

Sektor penyumbang PDRB terbesar di kabupaten Jember pada tahun 1998 adalah sektor pertanian Rp 2.180.005.720,- (40,41%), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran Rp 790.590.130,- (21,66%), sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan Rp 279.195.000,- (7,23%) ; sektor industri Rp 330.477.500,- (7,03%) ; sektor pengangkutan dan komunikasi Rp 168.755.270,- (6,84%).

4.1.3 Perkembangan Industri di Kabupaten Jember

Sektor industri di kabupaten Jember mengolah atau memproduksi 77 macam produk. Sebagian besar produk-produk tersebut dihasilkan oleh industri-industri berskala kecil. Di kabupaten Jember terdapat hanya 7 industri yang digolongkan sebagai industri menengah, yaitu industri tembakau, rokok, bumbu rokok, gula, kopi / kakao / karet, getah pinus, bengkel / perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan. Daftar produk yang dihasilkan oleh sektor industri di Kabupaten Jember dapat dilihat pada lampiran 1.

Perkembangan subsektor industri kecil kabupaten Jember dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja dan nilai produksi selama periode tahun 1994-1999 dapat dilihat pada tabel 3 (hal 36).

Tabel 3 : Perkembangan Nilai Produksi dan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil di Kabupaten Jember Tahun 1994 s/d 1999.

Uraian Tahun	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Produksi (000)
1994	31.502	48.244.666
1995	40.960	84.748.217
1996	51.600	122.349.744
1997	63.982	160.718.190
1998	65.583	165.613.945
1999	68.886	177.338.032

Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Th 1999

Berdasarkan pada tabel 3. hasil laporan tahunan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan tahun 1999 nilai produksi berjumlah Rp. 177.338.032,- dibandingkan dengan tahun 1994 dengan nilai produksi Rp. 48.244.666,- berarti nilai produksi sub sektor industri kecil mengalami kenaikan sekitar 367 %.

Penyerapan tenaga kerja pada tahun 1994 berjumlah 31.502 orang sedangkan pada tahun 1999 menjadi 68.886 orang berarti selama periode tersebut tenaga kerja yang diserap mengalami kenaikan sebesar 218%.

4.2. Analisis Data

Kegiatan produksi pada subsektor industri kecil ternyata telah banyak menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk di wilayah Kabupaten Jember. Sehubungan dengan itu di dalam penulisan ini penggunaan analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan sub sektor ini dalam menyerap tenaga kerja.

Untuk mengetahui elastisitas penyerapan tenaga kerja maka terlebih dahulu dicari besarnya prosentase laju kenaikan tenaga kerja dan laju kenaikan nilai produksi yang masing-masing ditunjukkan oleh tabel 4. dan tabel 5.

Tabel 4. : Laju kenaikan Tenaga Kerja yang terserap pada subsektor industri kecil di Kabupaten Jember periode Tahun 1994-1999.

Tahun	T.K. terserap (orang)	Δ (angka)	Δ (%)
1994	31.502	-	-
1995	40.960	9.458	30
1996	51.600	10.640	26
1997	63.982	12.382	23
1998	65.583	1.601	2
1999	68.886	3.303	5

Sumber : Tabel 3 (hal 36).

Tabel 5. : Laju Kenaikan Nilai Produksi pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember periode Tahun 1994-1999.

Tahun	Nilai Produksi (000)	Δ (Angka)	Δ (%)
1994	48.244.666	-	-
1995	84.748.217	36.503.5551	75
1996	122.349.744	37.601.527	44
1997	160.718.190	38.368.446	31
1998	165.613.945	4.895.755	3
1999	177.338.032	11.724.087	7

Sumber : Tabel 3(hal 36).

Dari analisa laju kenaikan jumlah tenaga kerja yang terserap (tabel 4.) dan analisa kenaikan nilai produksi (tabel 5.) pada sub sektor industri kecil, maka besarnya elastisitas kesempatan kerja dapat diketahui seperti yang ditunjukkan pada tabel 6. berikut :

Tabel 6. : Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember periode Tahun 1994-1999.

Tahun	Δ Tenaga kerja (%)	Δ Nilai Produksi (%)	Elastisitas Penyerapan T.K.
1994 / 1995	30	75	0,40
1995 / 1996	26	44	0,59
1996 / 1997	23	31	0,74
1997 / 1998	2	3	0,66
1998 / 1999	5	7	0,71

Sumber : Tabel 4. (hal.37) dan Tabel 5 (37).

Berdasarkan tabel 6. dapat dijelaskan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja subsektor industri kecil periode tahun 1994 – 1999 mengalami perubahan secara fluktuatif, dimana elastisitas tertinggi adalah pada tahun 1996 / 1997 dengan nilai sebesar 0,74 dan terendah tahun 1994 / 1995 dengan nilai 0,40. Selama periode 1994 s.d. 1997 terjadi trend kenaikan elastisitas namun pada periode 1997 / 1998 elastisitas menurun, pada periode 1998 / 1999 elastisitas kembali meningkat.

Tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja subsektor industri kecil selama periode 1994 – 1999 adalah sebesar 0,56 (lampiran 4) (hal 46). Angka elastisitas sebesar 0,56 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan 100% nilai produksi maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja sebesar 56 orang.

4.3. Pembahasan

Elastisitas penyerapan tenaga kerja subsektor industri kecil periode 1994 – 1999 sebesar 0,56 menunjukkan bahwa subsektor ini cukup potensial untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kemampuan subsektor industri kecil dalam menyerap tenaga kerja kemungkinan disebabkan oleh teknik produksi yang masih sederhana. Pembangunan / Pengembangan sub sektor ini akan membuka kesempatan kerja baru sehingga jumlah pengangguran dapat dikurangi.

Mengingat bahwa permintaan tenaga kerja adalah *derived demand* (permintaan turunan) dari permintaan output perusahaan oleh konsumen maka peningkatan penyerapan tenaga kerja akan terjadi jika permintaan konsumen terhadap output perusahaan meningkat. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan produknya dengan cara mengetahui selera konsumen, mengadakan promosi, membuka stan/toko yang strategis, mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, dll. Usaha untuk meningkatkan elastisitas penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan persediaan faktor-faktor produksi pelengkap, penghapusan distorsi harga faktor-faktor produksi (misalnya subsidi peralatan canggih yang hemat tenaga kerja, kebijaksanaan upah minimum buruh yang terlalu tinggi), dan lain-lain.

Mengingat kemampuan subsektor industri kecil yang cukup baik dalam menyerap tenaga kerja, maka upaya-upaya mengembangkan subsektor ini perlu lebih ditingkatkan karena akan menambah kokohnya perekonomian bagi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan yang akan menciptakan kesempatan kerja lebih luas, mengurangi/menghapuskan kemiskinan absolut, menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dan menciptakan perangsang untuk mengadakan lebih banyak penanaman modal sehingga dapat memperlancar pembangunan di daerah Kabupaten Jember.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapatlah dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: elastisitas penyerapan tenaga kerja subsektor industri kecil di Kabupaten Jember selama periode tahun 1994-1999 adalah sebesar 0,56 (inelastis). Hal ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan nilai produksi sebesar 100% akan menyebabkan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 56 orang. Meskipun elastisitas penyerapan tenaga kerja subsektor industri kecil di Kabupaten Jember dikategorikan inelastis, namun subsektor ini memiliki kemampuan yang cukup potensial dalam menyerap tenaga kerja.

5.2. Saran

Mengingat bahwa subsektor industri kecil memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyerap tenaga kerja, maka jika subsektor ini dikembangkan akan tercipta semakin banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Beberapa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan subsektor industri kecil adalah :

1. Menghapuskan subsidi dan perlakuan khusus yang menguntungkan perusahaan besar dan merugikan perusahaan kecil.
2. Memperluas peluang untuk memperoleh dan menggunakan faktor-faktor produksi yang umumnya diperlukan oleh pengusaha kecil.
3. Memperbesar jumlah penyalur barang-barang buatan perusahaan kecil.
4. Memperbaiki sistem informasi ekonomi.
5. Integrasi perusahaan kecil dalam organisasi-organisasi masyarakat sehingga dapat turut serta dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi untuk kemajuan usahanya.
6. Menghapuskan hambatan untuk memperoleh kredit.
7. Pelayanan pemberian nasehat teknis yang lebih baik.
8. Memperbesar peluang untuk masuk pasar.

9. Menghapuskan hambatan-hambatan karena lokasi.
10. Perlu diadakan lebih lanjut penelitian mengenai industri kecil



Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin., 1997, **Ekonomi Pembangunan**, STIE YKPN, , Yogyakarta .
- Basri, Faisal H., 1995, **Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI**, Erlangga, Jakarta.
- Glassburner., Chandra A., 1981, **Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro**, , LP3ES, Jakarta.
- Jhingan, M.L., 1996, **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan** (terjemahan), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad., 1997 **Ekonomi Pembangunan**, , UPP AMP YKPN, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Nurimansjah, Hasibuan, 1994, **Ekonomi Industri**, LP3ES, Jakarta
- Simanjuntak, Payaman J. 1985, **Ekonomi Sumber Daya Manusia**, LPFEUI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono., 1981 **Ekonomi Pembangunan**, Borta Barat, Cetakan Kedua, Medan.
- Todaro, Michael P., 1995, **Ekonomi untuk Negara Berkembang** (terjemahan), Bumi Aksara, Edisi ketiga, Jakarta.

Lampiran 1. Daftar Produk Industri di Wilayah Kabupaten Jember

DAFTAR PRODUK INDUSTRI
DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER

NO	PRODUK/KOMODITI	NO	PRODUK/KOMODITI
1	Tembakau	42	Suwar suwir (ik Kembang Gula)
2	Bobbin	43	Tape ↘
3	Cerutu	44	So'un
4	Bumbu Rokok	45	Kerajinan dari kayu Kelapa/Kayu Aren
5	Plouiding dan Komponen Bahan bangunan	46	Handycraft berbentuk Selancar
6	Furniture	47	Tasbih/Kalung Pocok/Manik manik
7	Es batu/Es Cream	48	Kerajinan dari Tempurung Kelapa
8	Karet	49	Kerajinan dari Serbuk Gergajian
9	Kopi	50	Tempe
10	Coklat/Kakao	51	Tahu
11	Teli	52	Minyak Kelapa
12	Terpentin/Getah Pinus	53	Kapur
13	Rumbu Rokok	54	Batu Piring
14	Makanan Ternak	55	Batu Bata
15	AMDK	56	Genteng
16	Vulkanisir Ban	57	Tegel/Barang dari semen
17	Bengkel Sepeda Motor/Mobil	58	Minuman Ringan/Limun selain AMDK
18	Bengkel Lassery	59	Dupa
19	Gula Tebu	60	Kosmetik/Shampo
20	Gula Merah	61	Kantong Plastik
21	Gula Semut	62	Bordir
22	Pengawetan/Pengolahan Sayur dan Buah	63	Pakaian Jadi
23	Peti Kemas dari Kayu	64	Krupuk
24	Sumpit Kayu	65	Ind. Alat alat Dapur
25	Meubei Rotan	66	Sapu ijuk
26	Kurungan Burung Perkutut	67	Kasur
27	Kere Bambu	68	Batik Tulis/cap
28	Anyaman bambu	69	Sulaman
29	Kerajinan Ukir ukiran Gembol	70	Jamu jawa (Toga)
30	Pengolahan Daging (Bakso)	71	Anyaman Tikar
31	Pengolahan Ikan (Ikan asin, pindang, Terasi)	72	Tenun Tikar
32	Penggiingan jagung	73	Keset / Kaset dari bahan daur ulang
37	Kerajinan Kulit Kerang	74	Gerabah/Gerabah Hias dr pelepah pisang
38	Anyaman Ban ban	75	Lukisan Bulu
39	Pande besi/Ind. Alat alat pertanian	76	Bengkel elektronika
40	Sayangan drum bekas/aluminium	77	Bengkel arloji
41	Perhiasan Perak		

Lampiran 2. Pertumbuhan Nilai Produksi Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember periode Th. 1994 – 1999

No	Tahun	Jumlah Nilai Produksi (000)	Δ Nilai Pro- duksi (000)	% Pertumb. Pd t0 dihit.dr t-1	Log Xi
1	1994	48.244.666			
2	1995	84.748.217	36.503.551	175,663	2,244
3	1996	122.349.744	37.601.527	144,368	2,159
4	1997	160.718.190	38.368.446	131,359	2,118
5	1998	165.613.945	4.895.755	103,046	2,013
6	1999	177.338.032	11.724.087	107,079	2,029
	Jumlah	747.012.794	120.093.366	120.093.366	10,56
	Rata-rata	124.502.132,3	24.018.673,2	24.018.673,2	

Dari data di atas dapat diperoleh :

$$N = 5 \sum \text{Log Xi} = 10,56$$

Dengan menggunakan rumus rata-rata akan diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Log Gm} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Log Xi}}{n} \quad \text{akan diperoleh :}$$

$$\text{Log Gm} = \frac{10,56}{5}$$

$$= 2,112$$

$$\begin{aligned} \text{Gm} &= 129,41 \\ &= 129,41 - 100 \\ &= 29,41 \end{aligned}$$

$$Q^{\circ} = 29,41 \%$$

Lampiran 3. Pertumbuhan Tenaga Kerja Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember periode Th. 1994 - 1999

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja	Δ Jumlah Tenaga Kerja	% Pertumb. Pd 10 dihit.dr t-1	Log Xi
1	1994	31502			
2	1995	40960	9.458	130,023	2,114
3	1996	51600	10.640	125,976	2,100
4	1997	63982	12.382	123,996	2,093
5	1998	65583	1.601	102,502	2,010
6	1999	68886	3.303	105,036	2,021
	Jumlah	322.513	37.384		10,338
	Rata-rata	53.752,2	7476,8		

Dari data di atas dapat diperoleh :

$$N = 5 \sum \text{Log Xi} = 10,338$$

Dengan menggunakan rumus rata-rata akan diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Log Gm} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Log Xi}}{n} \text{ akan diperoleh :}$$

$$\text{Log Gm} = \frac{10,338}{5}$$

$$= 2,067$$

$$\begin{aligned} \text{Gm} &= 116,68 \\ &= 116,68 - 100 \\ &= 16,68 \\ \text{L}^\circ &= 16,68 \% \end{aligned}$$

Lampiran 4. Elastisitas Tenaga Kerja Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Jember periode Th. 1994 – 1999

$$N = \frac{L^o}{Q^o}$$
$$= \frac{16,68 \%}{29,41 \%}$$
$$N = 0,56$$

